

**FUNGSI KEUCHIK DALAM PELAYANAN PUBLIK  
DI KECAMATAN GLUMPANG BARO  
KABUPATEN PIDIE**

*Oleh : Halimah, Halik*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini: a) Untuk mengetahui sejauhmana fungsi Keuchik dalam pelayanan publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Keuchik dalam pelayanan publik tersebut. c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Keuchik untuk menaggulanginya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Mengambil sampel 60 orang dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Keuchik Gampong dalam pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan di segala sektor pembangunan Gampong, tidak terlepas dari didukung masyarakat secara nyata dalam proses pembangunan tersebut, selain itu upaya mamajukan pemerintahan dan pembangunan Gampong, orang yang sangat berperan yaitu Keuchik. Fungsi Keuchik dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan dijumpai berbagai faktor penghambat. Hambatan-hambatan dimaksud antara lain Keuchik belum sepenuhnya berhasil dalam pelayanan publik dikarenakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik belum memadai seperti kantor Keuchik belum ada, komputer juga belum ada, kemampuan Keuchik masih terbatas, karena dalam pelayanan publik khususnya dalam pembuatan surat menyurat sudah menggunakan komputer, sementara perangkat gampong di beberapa Gampong belum mampu mengoperasikan komputer.

**Kata Kunci :** Fungsi, Keuchik, Peayanan Publik.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan badan permusyawaratan Gampong yang disebut juga dengan Tuha Peut atau nama lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Organisasi Pemerintah yang terendah disebut dengan Desa. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa berdasarkan pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang universal, tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Gampong dalam hal ini Keuchik Gampong yang menyelenggarakan semua pelayanan publik atau masyarakat. Keberhasilan Pemerintahan di tingkat Gampong banyak hal yang ikut mempengaruhinya seperti kemampuan manajemen pelaksana dalam melakukan pelayanan publik serta dalam melaksanakan berbagai hal yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pembangunan tersebut terutama yang menyangkut dengan perencanaan, pengawasan dan teknik pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Fungsi Keuchik Gampong dalam pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan di segala sektor pembangunan Gampong, tidak terlepas dari didukung masyarakat secara nyata proses pembangunan sangat besar kemungkinan pembangunan yang dimaksud tidak berjalan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Bila hal ini terjadi akan memberikan dampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan dinamika pembangunan yang dilaksanakan di Gampong. Jadi dalam upaya mamajukan pemerintahan dan pembangunan Gampong, orang yang sangat berperan adalah Pemerintah Gampong itu sendiri yaitu Keuchik, dan unsur Pemerintah Gampong. Pemerintah Gampong

paling berperan dalam pelayanan masyarakat dan juga menyukseskan pembangunan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan sedang dijalankannya.

Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong semuanya bersumber dari Pemerintah tingkat atas baik dari Pemerintah Mukim, Pemerintah Kecamatan, Kabupaten bahkan dari Pemerintah Pusat. Sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal ini Keuchik Gampong harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan urusan rumah tangga Gampong terdapat dua dimensi administrasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong yaitu pelaksanaan administrasi dalam arti luas untuk mencapai tujuan dan keiginan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan fisik dan mental, dan pelaksana administrasi perkantoran yang merupakan tugas Keuchik dan perangkat gampon untuk memberikan pelayanan public

Berbagai proses administrasi Pemerintahan Gampong yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat oleh karena itu pelayanan Pemerintahan Gampong khusus menyangkut dengan pelayanan administrasi Gampong haruslah dilaksanakan dalam suatu sistem secara tumpah dan terpadu baik dilihat dari unsur administrasi yang luas atau dalam mewujudkan keinginan masyarakat didalam rangka perwujudan otonomi gampong maupun pelaksanaan administrasi arti sempit yaitu pelayanan administrasi Gampong. Menampung aspirasi masyarakat merupakan tugas Keuchik dan Perangkat Gampong lainnya aspirasi tersebut harus diterima dan memusyawarahkan dengan para Tuha Peut. Secara umum prinsip pelayanan publik adalah cepat, tepat, prosedur, memudahkan dan jangan mempersulit, karena keberadaan atau adanya pemimpin bersama perangkatnya adalah untuk melayani dan memperlancar roda Pemerintahan Gampong serta pelayanan publik yang optimal. Dalam

pelayanan pembangunan baik pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya maupun dalam bidang lainnya perlu adanya komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait bahkan dengan masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan. Peranan media massa dewasa ini sangat membantu masyarakat dalam menerima berbagai informasi baik mengenai pembangunan maupun informasi lainnya yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat. Dengan adanya media massa ini masyarakat lebih mengerti dan memahami bagaimana semestinya pelayanan yang harus diterima dan diberikan oleh pemerintah. Melalui media massa komunikasi akan terjalin antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa banyak hal yang menyebabkan sekelompok masyarakat sukar menerima perubahan. Oleh karena itu disinilah letak peranan seorang pemimpin yang harus dilaksanakan melalui media-media komunikasi dalam hal ini Keuchik juga selaku komunikator pembangunan Gampong jadi lengkaplah peranan seorang pemimpin dalam menghadapi hambatan terhadap proses perubahan dalam suatu masyarakat. Seorang Keuchik sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang berada ditingkat Kecamatan, menggunakan berbagai teknik atau metode agar masyarakat dapat mengerti dan memahami arti pentingnya pelaksanaan pembangunan, apabila hal ini dapat dilakukan dengan sempurna, maka pelaksanaan pembangunan yang diarahkan ke Gampong-Gampong akan membawa hasil yang memuaskan. Sistem informasi dan komunikasi yang tepat dan terarah serta terpadu perlu sekali dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat pula dilakukan karena adakalanya keinginan dan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah sering kali terjadi benturan, sehingga banyak masalah-masalah yang perlu segera diselasaika. Tujuan pem-bangunan adalah menciptakan swadaya dimana masyarakat Gampong menjadi subjek dan bukan objek pembangunan. Namun kesenjangan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan masih tetap terjadi. Salah satu

penyebabnya adalah masalah peranan Keuchik dalam memberikan informasi pembangunan, yang sebenarnya harus diterima oleh masyarakat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitiannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana fungsi Keuchik dalam pelayanan publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie?
2. Hambatan apa saja yang dialami Keuchik dalam pelayanan publik tersebut?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangnya?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada pelaksanaan penelitian ini yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauhmana fungsi Keuchik dalam pelayanan publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Keuchik dalam pelayanan publik tersebut.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menaggulangnya .

### 1.4. Metode Penelitian

Adapun lokasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie, dengan waktu penelitian mulai tanggal 3 September sampai dengan 3 Desember 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan data yang kongkrit serta keterangan yang

akurat yang sangat dibutuhkan, oleh karena itu dalam penulisannya menggunakan pendekatan deskriptif.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Gampong yang dijadikan sampel populasi adalah seluruh Perangkat Pemerintah Gampong pada Kecamatan GlumpangBaro dan seluruh masyarakat dalam Gampong pada kecamatan Glumpang Baro.

Pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara purposif sampling artinya tidak semua populasi ditetapkan sebagai sampel melainkan diambil secara acak yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu yang ditetapkan sebagai sampel responden antara lain adalah : a) Keuchik 3 orang, b) Sekretaris Gampong 3 orang, c) Tuha Peuet Gampong 12 orang, d) Perangkat Gampong 12 orang, e) Masyarakat Gampong 30 orang sebagai pengguna layanan, dan jumlah total responden adalah sebanyak 60 orang.

## **2. Landasan Teoritis**

### **2.1 Pengertian Keuchik**

Dalam pasal 1 Nomor 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan: "Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkann dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong menyebutkan bahwa Keuchik adalah badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dipilih langsung oleh masyarakat. Pengertian Keuchik menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 menyebutkan bahwa Keuchik adalah: "Orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin Pemerintah Gampong". Beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Keuchik merupakan orang dipilih oleh masyarakat

Gampong dan diangkat oleh pihak yang berwenang untuk menjadi pemimpin di Gampong yang mempunyai tugas melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut dengan Pemerintah dan Pembangunan.

## 2.2 Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah merupakan orang yang kerjanya melayani". Dengan demikian pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang bahkan oleh Pemerintah untuk melayani orang lain. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh M. Ali, (2012:14) dalam Kamus Bahasa Indonesia merumuskan pengertian pelayanan adalah : "Usaha untuk melayani kebutuhan orang lain atau dari pengertian melayani yang berarti membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang". Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bajuri, (2012:31) pelayanan prima adalah : "Kemampuan, sikap, perhatian, tindakan dan tanggung jawab". Pelayanan yang dituntut saat ini adalah pelayanan prima yang dapat memenuhi harapan masyarakat atau lebih baik dari standar dan azas-azas pelayanan publik. Dalam organisasi publik hal ini telah menjadi tuntutan sejak munculnya teori negara baru tentang azas keadilan. Oleh karena itu dalam pelayanan primapun perlu adanya standar pelayanan sebagai ukuran yang telah ditentukan untuk pembakuan pelayanan yang baik dan adil. Bila seluruh pelayanan telah memiliki standar, maka akan lebih mudah memberikan pelayanan yang baik, sehingga secara kontinue akan dapat disebut prima.

## 2.3 Publik

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "Public" dan Publik dapat diartikan tiga hal yaitu :

- a. Umum, misalnya : *Public Unility* adalah data perusahaan umum atau *Public Ondership* adalah data milik umum;

- b. Masyarakat, misalnya : *Public Relation* adalah arti hubungan masyarakat, *Public Service* adalah arti pelayanan masyarakat, dan *Public Interest* adalah arti kepentingan masyarakat;
- c. Pemerintah atau Negara, misalnya : *Public Administration* adalah arti Administrasi Negara, *Public Buildup* adalah arti Gedung Negara, dan *Public Finance* adalah arti Keuangan Negara.

Menurut pendapat Inu Kencana Syafii Dkk (2013:18) mengatakan bahwa yang dikatakan Publik adalah : "Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki". Menurut pendapat Harbani Pasolong (2012:6) menjelaskan bahwa Publik adalah lima perspektif yaitu :

1. Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat;
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri;
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan bagi masyarakat, yaitu kepentingan Publik diwakili melalui suara;
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai Publik;
5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik, karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

#### 2.4. Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik berdasarkan ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan



Publik adalah : Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pemerintah memutuskan untuk ikut mengelola sektor pertanian, terutama menetapkan harga beras, minyak goreng cengkeh dan tebu. Pada saat yang sama memutuskan untuk tidak mengelola sayur mayur, buah-buahan dan kentang. Konsekwensi dari pada keputusan Pemerintah tersebut adalah merupakan perubahan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa publik. Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan publik adalah pengadaan barang dan jasa, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah. Adapun barang swasta dicirikan oleh adanya revalitas, seperti baju, sepatu dan lain-lain. Baik barang publik maupun privat disektor permintaan (demand) ditentukan oleh produsen yang bertujuan mencari keuntungan, persediaan barang publik ditetapkan melalui proses politik. Diantara keduanya terdapat barang swasta yang memiliki nilai strategis sehingga mengundang campur tangan Pemerintah untuk mengelolanya. Misalnya pangan, industri pupuk, industri kimia, industri otomotif dan sebagainya. Di sisi lain juga terdapat barang publik dimana swasta tertarik untuk mengelolanya seperti jalan tol, kesehatan, pendidikan, sampah, air minum dan sebagainya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan publik memiliki masalah sosial, ekonomi dan politik.

Dalam pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan, sebab tanpa ukuran ini ketimpangan pelayanan publik tidak dapat dihindari. Pentingnya ukuran ini juga memperhatikan bahwa Birokrasi Publik cenderung menghindari kelompok miskin rentan dan terpinggirkan. Sementara itu telah umum diketahui antara efisiensi dan efektivitas

merupakan *the big trade off*. Ketika Pemerintah memacu efisiensi pelayanan publik untuk lapisan bawah, miskin dan terpendul yang biasanya diabaikan. Pelayanan untuk kelompok ini memerlukan biaya besar yang biasanya berupa subsidi, pengobatan gratis dan murah. Pelayanan jenis ini hanya mungkin diproduksi jika Pemerintah memiliki Sumber Daya yang cukup besar, namun demikian efektivitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan memilah-milah kelompok sasaran guna diberlakukan jenis kebijakan yang berbeda.

Menurut pendapat Tjiptono (2014 :124) memberikan batasannya tentang pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Sedangkan menurut pendapat Kotler (2013 :83) mendefinisikan pelayanan adalah setiap kegiatan atau tindakan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut pendapat lain Norman (2013 :134) pelayanan tidak berwujud tetapi bisa dirasakan. "Hakikat pelayanan adalah usaha/kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepuasan. Dilayani rasa/penilaian tentang kegiatan yang diterima atas tindakan pelayan". Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan.

## 2.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong

Dalam pasal 2 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011, yaitu tentang Pemerintah Gampong dijelaskan bahwa Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan secara otonomi, dan melaksanakan pembangunan, Melestarikan adat membina serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 diatas dan dalam pasal 9 disebutkan pula Gampong mempunyai fungsi antara lain adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan secara otonomi berdasarkan azas otonomi asli, azas desentralisasi, maupun azas dekonsentrasi tugas pembantuan, segala urusan Pemerintahan lain yang berada di Gampong.
- b. Pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual Gampong.
- c. Pembinaan kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Gampong.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan, atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong.

Tugas, dan fungsi Gampong untuk menjalankan roda Pemerintahan di tingkat Gampong dan juga sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Untuk menciptakan kondisi yang harmonis, adil, sejahtera serta menciptakan rasa aman dalam menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan dan pembangunan maka Keuchik diharapkan pro aktif dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

#### 2.6. Tugas dan Fungsi Keuchik

Sebagaimana yang ditulis dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh disebutkan dalam pasal 1 Nomor 12 tentang pengertian Keuchik yaitu : Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian di dalam Qanun Preovinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam mnyatakan bahwa Keuchik

adalah Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Tugas dan fungsi Keuchik adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- b. Membina Kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup
- e. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
- f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam masyarakat
- g. Mengajukan rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong.
- h. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- i. Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

##### **3.1.1. Fungsi Keuchik Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Glumpang Baro**

Ada beberapa bidang kegiatan yang telah dilaksanakan Keuchik Gampong dalam kecamatan Glumpang Baro khususnya di beberapa Gampong yang dijadikan sampel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik antara lain :

1. Bidang pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. Sebagai konsekwensi dari komitmen tersebut setiap warga memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya 9 tahun. Sasaran yang ingin di capai dalam peningkatan pendidikan yang berkualitas pada lima tahun kedepan adalah : a) Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, b) Meningkatkan jumlah anak yang terlayani pada pendidikan dasar, dan c) Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan usia dini, dasar dan menengah. Arah kebijakan atau sasaran peningkatan kualitas pendidikan masyarakat akan dilaksanakan sebagai berikut : a) Peningkatan mutu pendidikan non formal dengan cara peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kelembagaan serta sarana prasarana TPA, b) Upaya pemerataan memperoleh pendidikan dan pengembangan budaya baca pada masyarakat, dan c) Peningkatan ketrampilan masyarakat khususnya RTM produktif.

## 2. Kesehatan

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental, selama ini pelayanan kesehatan kepada masyarakat relatif rendah terutama masyarakat miskin. Tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi, rendahnya gizi masyarakat hal ini diperparah oleh jauhnya jangkauan pelayanan kesehatan, sehingga secara umum mutu kesehatan masyarakat sangat rendah. Untuk memperbaiki keadaan tersebut kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan kepada: a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, b) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama penduduk miskin, dan c) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan serta perilaku hidup sehat.

## 3. Sarana prasarana

Bidang sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung utama terhadap pelaksanaan bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan lainnya, arah kebijakan bidang sarana prasarana antara lain : a)

Penyediaan sarana Transportansi yang layak, b) Sarana prasarana pemerintahan (kantor), c) Sarana prasarana pemukiman, d) Sarana prasarana pertanian, dan e) Sarana prasarana penunjang lain.

#### 4. Lingkungan Hidup

Arah kebijakan lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya agar pemukiman tertata dengan baik dan nyaman adalah:

a) Penyehatan lingkungan, b) Pengelolaan persampahan, c) Penyuluhan, dan d) Sosialisasi kesehatan lingkungan.

#### 5. Sosial Budaya

Arah kebijakan sosial budaya lebih ditujukan pada pengembangan nilai-nilai budaya terutama seni budaya.

#### 6. Modal Usaha Kelompok Masyarakat

Pembangunan bidang ekonomi mikro dan usaha masyarakat karena sektor tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan yang akan diterapkan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha masyarakat adalah : a) Pengembangan dan peningkatan usaha kecil, b) Penambahan modal kelompok SPP/UEP agar akses modal bagi masyarakat miskin lebih mudah, dan c) Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok.

#### 7. Pertanian, Kehutanan, Peternakan

Pembangunan bidang pertanian dan Peternakan selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam peningkatan ekonomi rakyat karena sektor ini menggantungkan hidup sebagian besar masyarakat di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Arah kebijakan diimplimentasikan: a) Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian/peternakan, b) Peningkatan kemampuan pelaku pertanian, dan c) Peningkatan sarana prasarana.

#### 3.1.2. Peranan Pemimpin Dalam Pelayanan Masyarakat

Tanpa adanya swadaya masyarakat dan partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pembangunan, usaha tersebut tidak akan

terlaksana sebagaimana yang diharapkan demikian pula sebaliknya, Dalam melaksanakan kepemimpinannya Pemerintah Gampong, dalam hal ini Keuchik selaku pemimpin di Gampong dituntut untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terciptanya suasana interaktif, suasana hubungan komunikasi timbal balik antara Keuchik sebagai pimpinan dengan masyarakat sebagai pengikutnya. Dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat yang akan menimbulkan swadaya bagi Pembangunan fisik Gampong. Dengan komunikasi dan kerjasama yang perlu dijalin dengan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, terutama Pemimpin informal, yang ada di Gampong diharapkan dapat menimbulkan swadaya masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Gampong sangat potensial terhadap pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu Pemerintah Gampong bersama-sama dengan masyarakat harus saling mendukung dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau program-program pembangunan yang diarahkan ke Gampong. Tanpa adanya dukungan masyarakat mustahil pemerintah Gampong dapat melaksanakan semua program tersebut. Seiring jalannya program pembangunan Gampong masyarakat Gampong diikutsertakan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keuchik merupakan promotor dalam berbagai kegiatan sosial dalam masyarakat khususnya di Gampong-Gampong seperti dalam kegiatan PKK, ia selalu mengharap dan mengarahkan kepada para wanita baik remaja putri maupun ibu-ibu untuk dapat saling membantu dalam setiap kegiatan PKK terutama yang dilaksanakan di Gampong maupun yang dilaksanakan di Ibukota Kecamatan. Sebagai penggerak kegiatan PKK di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie dalam jangka waktu setahun sekali biasanya dilaksanakan lomba masak memasak dan ketrampilan lain yang diikuti oleh semua organisasi PKK yang di di Gampong-Gampong dalam Kecamatan Glumpang Baro. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang diperlombakan dalam kegiatan PKK di tingkat Kecamatan untuk

kegiatan bidang masak memasak yaitu memasak makanan dengan bahannya non beras.

Sedangkan kegiatan ketrampilan yang diperlombakan adalah cara merangkai bunga dan beberapa ketrampilan lain bidang kewanitaan. Kegiatan kesenian merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai oleh generasi muda baik di Gampong maupun di Kota, karena seni merupakan suatu keindahan yang melambangkan kepribadian seseorang. Sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kesenian ini tidak dilaksanakan perlombaab, kecuali hanya kegiatan rebana yang diselenggarakan oleh anak-anak di bawah umur 15 tahun yang dilaksanakan khusus pada saat Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Olah Raga merupakan salah satu kegiatan yang sangat digemari oleh para remaja baik putra maupun putri, karena dengan berolah raga semua genarasi muda diharapkan akan menjadi generasi muda yang sehat dan tangguh dalam menjalankan kehidupan dan cita-citanya. Membina genarasi muda melalui kegiatan olah raga diselenggarakan di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie terutama di beberapa Gampong dirasakan masih kurang, hal ini disebabkan fasilitas yang tersedia belum memadai jika dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Sesuai dengan kenyataan yang ditemui dari penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa Gampong dalam Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie yang telah memiliki sarana / fasilitas kegiatan olah raga seperti lapangan bola volly dan lapangan bola kaki, sedangkan fasilitas olah raga yang lain belum dimiliki sehingga apabila ada genarasi muda atau kalangan tua yang hendak mengikuti kegiatan olah raga lain mereka harus datang ke ibu kota Kecamatan atau ke Kabupaten. Melalui berbagai kegiatan dan organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diharapkan masyarakat dapat memperoleh banyak pengetahuan serta ketrampilan-ketrampilan khusus yang dapat dipergunakan ditengah-tengah masyarakat. Sebagai salah satu wadah



pembinaan masyarakat terutama generasi muda Keuchik bersama-sama dengan perangkat Gampong berupaya untuk lebih meningkatkan semua kegiatan kepemudaan, serta mengarahkan kegiatan-kegiatan tersebut secara menyeluruh sehingga diharapkan dapat membina watak dan kepribadian masyarakat pada umumnya., dan generasi muda pada khususnya agar berguna bagi pembangunan bangsa dan negara serta berguna bagi lingkungan dan keluarganya.

Keamanan dan ketertiban di Gampong merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab Keuchik dan seluruh masyarakat Gampong. Keamanan dan ketertiban di tiap-tiap Gampong harus selalu dijaga guna untuk menjaga timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Keuchik selalu penanggung jawab penuh dalam bidang keamanan dan ketertiban di Gampong harus senantiasa waspada bterhadap rongrongan yang timbul dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk menjaga hal tersebut Keuchik senantiasa membina dan mengarahkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. Keuchik merupakan seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Gampong, apalagi Keuchik tersebut merupakan seorang pemimpin yang kharismatik. Dalam membina masyarakat seorang pemimpin dalam hal ini Keuchik harus terlebih dahulu mengetahui sikap dan perilaku masyarakat yang dipimpinnya, karena keberhasilan seorang pemimpin ditandai dengan kepatuhan masyarakat terhadap apa yang diperintahkan oleh sang pemimpin terutama dalam melaksanakan berbagai macam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

### 3.1.3. Hambatan-Hambatan Yang Dijumpai

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi Keuchik dalam pelayanan publik di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten

Pidie, Hambatan-hambatan dimasud antara lain dapat penulis sajikan berikut ini :

- 1) Keuchik belum sepenuhnya berhasil dalam pelayanan publik dikarenakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik belum memadai seperti halnya Kantor Kechik belum ada masih dalam proses pembangunan Komputer juga belum ada;
- 2) Kemampuan Kechik masih terbatas, karena dalam pelayanan publik khususnya dalam pembuatan surat menyurat sudah menggunakan komputer, sementara Keuchik di beberapa Gampong yang dijadikan sampel tidak mampu mengaplikasikan komputer.

### 3.2. Pembahasan

Pelaksanaan pembangunan itu sendiri tetap diarahkan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman dan sebagainya, melainkan keselarasan dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri disamping untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus harus pula dapat menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai azas keadilan sosial sehingga disatu pihak pembangunan, itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi, melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dengan menumbuhkan azas hidup sederhana, bukan saja untuk mencapai masyarakat yang makmur, melainkan juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Dilain pihak kepedulian masyarakat terhadap pembangunan perlu terus ditingkatkan, karena dengan meningkatkannya pembangunan disuatu daerah, maka besar kemungkinan daerah tersebut akan semakin maju dan berkembang sesuai dengan harapan

kita semua Pelaksanaan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor adalah merupakan suatu upaya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah dalam Kecamatan Glumpang Baro telah berusaha secara bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan menurut kemampuan dan kekuatan yang ada, dimana hasilnya telah dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh masyarakat, namun dari hasil-hasil yang telah dicapai tersebut masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan dimasa-masa yang akan datang. Kekurangan dimaksud adalah disebabkan karena disamping kekurangan dan keterbatasan dana yang tersedia, juga disebabkan karena keterbatasan atau kurangnya tenaga ahli yang mampu mengelola sumber daya dan sumber alam secara efektif, sedangkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terus meningkat. Oleh karenanya hambatan-hambatan sosial yang terjadi serta keterbatasan tenaga ahli yang membuat kendala, namun pemerintah telah berusaha dengan kemampuan yang ada untuk melaksanakan tugas dimaksud seoptimal mungkin.

Pembangunan yang dititik beratkan pada peningkatan sarana dan prasarana di bidang perekonomian, tidak berarti bahwa perhatian dibidang mental spiritual diabaikan, kedua bidang tersebut mutlak diperlukan untuk suksesnya pembangunan. Sedangkan pembangunan dibidang ekonomi dimaksudkan, yaitu menyangkut dalam berbagai kegiatan ekonomi dari masyarakat gampong sesuai dengan potensi gampong yang dimiliki. Hal ini terasa amat penting bagi kelanjutan perkembangan perekonomian masyarakat gampong. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata yang ingin diupayakan melalui pembangunan, semua itu dapat dicapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi yang harus dihasilkan dalam pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu perlu diusahakan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Dikalangan masyarakat gampong disamping adanya swadaya masyarakat terhadap

pembangunan, masyarakat juga ingin berpartisipasi dalam setiap gerak dan langkah pembangunan. Partisipasi dapat timbul dalam bentuk aktivitas-aktivitas bersama dalam program-program pembangunan, dan juga bisa diluar aktivitas bersama. Partisipasi dalam bentuk aktivitas bersama masyarakat gampong diajak, disesuaikan, diperintah atau dipaksa untuk men-yumbangkan tenaga atau hartanya kepada pembangunan yang sedang dilaksanakan biasanya dalam bentuk fisik. Dalam partisipasi yang lain, tidak ada pembangunan yang khusus, tetapi ada pembangunan biasanya bersifat non fisik dan tidak memerlukan partisipasi masyarakat atas perintah atau paksaan pihak atasan untuk melaksanakannya. Kegiatan bersama dalam pembangunan yang tumbuh dari masyarakat sendiri dan memperoleh bantuan dana maupun bimbingan teknis dari pemerintah. Menurut konsep pemerintah bentuk Swadaya masyarakat gampong terhadap pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan berupa dukungan maupun sumbangan dalam bentuk tenaga, uang, jasa dan ketrampilan.

Sifat gotong-royong, musyawarah dan mufakat dalam kehidupan masyarakat merupakan pendukung utama terhadap pelaksanaan pembangunan gampong. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu sikap hidup yang tinggi nilainya. Kebiasaan gotong royong dalam kehidupan masyarakat biasa dilihat dari kebiasaannya untuk saling tolong menolong, kerja bakti. Hal ini sudah merupakan suatu budaya yang hidup dan bertkembang ditengah-tengah masyarakat gampong. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kuchik dalam pelayanan publik yang menyangkut derngan kehidupan masyarakat di Gampong seperti dalam bidang PKK, kegiatan olah raga, pembinaan ketertiban dan keamanan dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Gampong. Pelayanan yang diberikan Keuchik dalam kegiatan PKK khususnya pembinaan kaum wanita. Dalam kegiatan ini banyak hal yang dapat dipelajari bagi kaum wanita atau ibu-ibu seperti

memasak, menjahit, menyulam, merangkai bunga dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peranan wanita dalam membina rumah tangganya.

#### 4. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, dan berdasarkan kenyataan atau data-data yang dijumpai dari hasil penelitian, sehingga penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut : 1) Fungsi Keuchik Gampong dalam pelayanan publik sangat menentukan keberhasilan di segala sektor pembangunan Gampong, tidak terlepas dari didukung masyarakat secara nyata dalam proses pembangunan tersebut. Jadi dalam upaya mamajukan pemerintahan dan pembangunan Gampong, orang yang sangat berperan adalah Pemerintah Gampong itu sendiri yaitu Keuchik, dan unsur Pemerintah Gampong lainnya. 2) Fungsi Keuchik dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan dijumpai berbagai faktor penghambat. Hambatan-hambatan dimaksud antara lain Keuchik belum sepenuhnya berhasil dalam pelayanan publik dikarenakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan publik belum memadai seperti halnya Kantor Kechik belum ada masih dalam proses pembangunan Komputer juga belum ada, kemampuan Kechik masih terbatas, karena dalam pelayanan publik khususnya dalam pembuatan surat menyurat sudah menggunakan komputer, sementara Kechik di beberapa Gampong yang dijadikan sampel belum mampu mengaplikasikan komputer.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Bajuri, 2012. *Reformasi Pelayanan Publik*, Buki Aksara: Jakarta

- Muhammad Ali, 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hassan Shadily, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta
- Harley, 2012. *Mukim Masa Ke Masa*, Jaringan Komunikasi Masyarakat Aceh, Banda Aceh
- Inu Kencana Syafei, 2013. *Sistem Administrasi Negara RI*, Bumi Aksara: Jakarta
- Norman, 2013. *Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2013. *Pengantar Antropologi*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sondang P.Siagian, 2014. *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta
- Saul.M.Katz, 2012. *Administrasi Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta
- Wayong, 2012. *Fungsi Administrasi Negara*, Djambatan, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah dan Desa, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.